

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintah yang meliputi: perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 yang mengutamakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi dan daya Saing Daerah, maka Renja OPD juga tidak terlepas dari kebijak strategis tersebut, dengan tetap memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi Renja beserta estimasi biaya tergambar dalam lampiran dokumen ini sebagai satu kesatuan utuh dari Renja OPD Tahun 2025.

Akhir kata, kiranya Renja OPD Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara optimal sebagai tugas dan pengabdian bagi bumi Lamaholot.

Sekian terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan

Kabupaten Flores Timur



Ir. TULIT BENI

Pembina Utama Muda

Nip. 196408171992031018

DAFTAR ISI

COVER	-----	
KATA PENGANTAR	-----	i
DAFTAR ISI	-----	ii
BAB I	-----	1
Latar Belakang	-----	1-2
Landasan Hukum	-----	2-4
Maksud dan Tujuan	-----	4-5
Sistematika Penulisan	-----	6
BAB II	-----	7
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur	-----	7-13
Analisa Kinerja Pelayanan OPD	-----	14-16
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	-----	16-17
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	-----	17-24
BAB III	-----	25
Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	-----	25-32
BAB IV	-----	33
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	-----	33-41
BAB V	-----	42
Penutup	-----	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025 merupakan Renja ke 3 dari penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Badan Pendapatan tertuang dalam dokumen perencanaan ini untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 yakni Optimalisasi Potensi PAD yang mana akan dicapai dengan arah kebijakan yang berunjuk pada Implementasi Digitalisasi sistem pemungutan PAD

Pada Proses penyusunan Renja BAPENDA Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja BAPENDA 2025 berdasarakan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor aa Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur;

- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja BAPENDA adalah dokumen perencanaan BAPENDA untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BAPENDA Tahun 2025.

- b. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- c. Mewujudkan capaian tujuan dan sasaran kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
 - a. Pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan :

BAB I Pendahuluan

Bab ini Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah agar Subtansi pada Bab selanjutnya dapat dipahami.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2024 Triwulan 2 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TAHUN 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come)/ Kegiatan (Out Put)	Target RENSTRA pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir priode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Targt Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			T	T	T	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32	11	11	0	-	10	21	0.66
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	16	4	4	0	-	3	7	0.44
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (dok)	8	2	2	0	-	2	4	0.50
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Koordinasi dan Konsultasi (dok)	4	4	4	0	-	4	8	2.00
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	1	1	0	-	1	2	0.50
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						-			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	37/14	37/14	38/14	-	-	37/14	37/14	100
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	-	12	-	-	12	12	1.00
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	4	1	-	-	-	0	1	0.25
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (lap)	4	1	1	0	-	1	2	0.50
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		8	0	2			2	2	0.25
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	4	0	1	0	0	1	1	0.25
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	4	0	1	0	0	1	1	0.25
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan		28	6	6		-	6	12	0.43

5	02	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dok)	4	0	1	-	1	1	0.25
5	02	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dok)	4	1	1	-	1	2	0.50
5	02	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dok)	4	1	0	0	0	1	0.25
5	02	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dok)	4	1	1		1	2	0.50
5	02	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Lap)	4	1	1		1	2	0.50
5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (dok)	4	1	1		1	2	0.50
5	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	4	1	1		1	2	0.50
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7	1			1	2	0.29
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	3	1			1	2	0.67
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	2	0			0	0	0.00
5	02	01	2.05	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (org)	2	0			0	0	0.00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		40	9			9	18	0.45
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (jenis)	12	2	0	0	3	5	0.42
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (jenis)	4	1	0	0	1	2	0.50
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	4	1	0	0	1	2	0.50
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (buku lmbrr)	4	2	-	-	1	3	0.75
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	1	-	-	1	2	0.50

5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos)	4	1	-	-		1	2	0.50
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis)	4	1	-	-		1	2	0.50
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	4	0	-	-		-	0	0.00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11	-				1	1	0.09
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	0	-	-		1	1	0.10
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang	1	0					0	0.00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	15				15	30	0.30
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)	4	1	-	-		1	2	0.50
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	1	-	-		1	2	0.50
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	1	-	-		1	2	0.50
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	88	12	-	-		12	24	0.27
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		292	35				38	73	0.25
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	240	22	-	-		25	47	0.20
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	1	-	-		1	2	0.50

5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	12	0	0		12	24	0.50
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						-		0	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		8	2				2	4	0.50
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	8	2	0	0		2	4	0.50
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		7.30%							0.00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		7.30%							
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dok)	8	2	0	0	0	2	4	0.50
5	02	04	2.01	02	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Pajak Daerah serta dan Kebijakan Pajak Daerah (Dok)	8	1	0	0	0	1	2	0.25
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan sosialisasi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah</i>	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	88	11	0	0	0	22	33	0.38
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Lap)	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek)	4	17000	0	0	0	20,000	37,000	9,250
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	8	2	0	0	0	2	4	0.50
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8	2	0	0	0	2	4	0.50

5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dok)	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (Dok)	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Dok)	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah	8	1	0	0	0	2	3	0.38
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	4	1	0	0	0	1	2	0.50
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Lap)	4	1	0	0	0	1	2	0.50

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sejak pembentukannya melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub urusan pendapatan yakni menitikberatkan pada Pendapatan Asli daerah. Sejak tahun 2020 BAPENDA melaksanakan rencana strategis penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2025 memiliki Pagu Belanja Daerahnya yakni Rp. 5.994.170.000 (*Lima miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Diharapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Akhir Tahun 2025 adalah Rp. 18.008.390.000 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Diharapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Akhir Tahun 2025 adalah 100%. Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pendapatan.
3. Belum optimalnya pendataan potensi pendapatan.
4. Terbatasnya jumlah pegawai.

Dari faktor-faktor penyebab tersebut diatas, Pimpinan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur akan melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan dan sinkronisasi program kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table 2.2 berikut ini.

Tabel. 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2024

Badan Pendapatan Daerah Kab. Flores Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		13
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah		100%	5.76	5.5	6.81	4.76	4.07		5.76	6.29	Perlu disusun PERBUB terbaru, pendataan dan pemutakhiran obyek apajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dalam mencapai target pendapatan daerah dari tahun ke tahun target yang ditetapkan meningkat hal tersebut didasari atas analisis PAD terhadap APBD pada tahun penyusunan RENSTRA OPD untuk tahun 2023-2026, dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Flores Timur perlu disusun Rancangan Perda dan Peraturan Bupati terbaru untuk mengoptimalkan potensi obyek pajak dan retribusi yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah 42 orang, Pegawai Negeri sipil berjumlah 38 dan Tenaga Pendukung Perkantoran 4 orang. Badan Pendapatan memiliki 5 UPT BPPRD yg melayani 19 Kecamatan yg ada.

Untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah yakni Bank NTT melalui pembayaran pajak secara online melalui aplikasi QRIS yang tersedia pada Bank NTT Mobile Banking. Hal ini memudahkan Wajib Pajak dimanapun dalam melakukan pembayaran pajak.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Lawang Sewu untuk pengadministrasian Pendapatan Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Koordinator Bidang Pendapatan melalui Program dan kegiatannya berusaha agar fungsi pokoknya dapat berjalan dengan baik agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah yakni:

1. Menyiapkan SDM untuk mengelola sitem digijalisasi.
2. Melakukan koordinasi dengan OPD penghasil PAD dalam meningkatkan target.
3. Melakukan Rekon persemester agar dapat mengetahui sejauhmana capaian target dan upaya memenuhi target dimaksud.
4. Melakukan Pendataan dan Pemutahiran obyek Pajak dan Retribusi

5. Menyiapkan Peraturan Daerah yang terupdate dalam menyikapi Perubahan Perundang-undangan terkait pajak.

6. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas

Strategis yang telah ditentukan memiliki beberapa kendala dan hambatan antara lain:

1. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran obyek pajak
2. Sistem aplikasi pendapatan belum semuanya terintegrasi dengan Bank yang ditunjuk.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dampak dari kendala diatas dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
2. Menidentifikasi potensi-potensi yang dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah.
3. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pajak dan retribusi kepada masyarakat karna pendapatan yang dihasilkan untuk pembangunan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, dimana Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 maka tidak ada pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah namun Program Kegiatan yang dilaksanakan tetap perdoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk mencapai sasaran dan target.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Tabel. 2.4

KODE						RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									5,994,170,000.00						6,242,377,658.00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100%	4,769,020,000	PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100%	4,856,445,000		
							Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100%				Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100%			
							Presentase ASN yang Memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%				Presentase ASN yang Memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%			
							Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%				Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63,150,000		
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	3	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	20,000,000		
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (dok)	2	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (dok)	2	19,000,000		
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	13,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	13,650,000		
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	10,500,000		

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,192,620,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,210,620,000	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	37 / 14	4,120,520,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	37 / 14		4,120,520,000	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas Asn (dok)	12	62,100,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12		79,600,000	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (lap)	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (lap)	1		10,500,000	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)				15,750,000	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	1	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	1		5,250,000	
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	1	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	1		10,500,000	
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				107,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan					112,350,000	
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dok)	1	20,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dok)	1		21,000,000	
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah (Dok)	1	20,000,000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah (Dok)	1		21,000,000	
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daera	Larantuka (OPD)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dok)	1	20,000,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daera	Larantuka (OPD)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dok)	1		21,000,000	

5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Lap)	1	15,000,000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Lap)	1	15,750,000	
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (dok)	1	18,000,000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dok)	1	18,900,000	
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	1	14,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	1	14,700,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10,500,000	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	1	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	1	10,500,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				132,200,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				173,075,000	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5,000,000	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15,000,000	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25,000,000	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan (paket)	1	25,200,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	25,000,000	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dok)	1	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dok)	1	1,500,000	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	1	18,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	1	20,000,000	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	1	53,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	1	80,000,000	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	1	1,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	1	1,575,000	

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10,000,000	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya (Unit)	1	9,000,000	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya (Unit)	1	10,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			171,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				172,000,000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	1	1,500,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	1	1,500,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Lap)	1	98,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Lap)	1	98,000,000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Lap)	1	3,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Lap)	1	3,500,000
5	02	01	2.08	0004	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Lap)	12	69,000,000	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Lap)	12	69,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78,700,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89,000,000	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	25	44,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	25	50,000,000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	22,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	22,000,000
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	17,000,000
5	02				KEUANGAN			1,225,150,000					1,385,932,658	
5	02	02			PRO GRAM PENGELO LAAN KEUANGAN DAERAH		Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2	450,250,000	PRO GRAM PENGELO LAAN KEUANGAN DAERAH		Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2	450,250,000

5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				450,250,000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				450,250,000	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	19 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dok)	1	450,250,000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	19 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dok)	1	450,250,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentase target PAD	6,29%	774,900,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentase target PAD	6,29%	935,682,658.00	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				774,900,000.00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				935,682,658.00	
5	2	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dok)	2	10,000,000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dok)	1	15,000,000	
5	0.2	04	2.01	0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Pajak Daerah serta dan Kebijakan Pajak Daerah (Dok)	2	60,000,000	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Dok)	1	30,000,000	Untuk Penyusunan RAN PERDA terbaru
5	2	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Adonara Timur, Adonara Barat, Wulanggintang, Solor Barat, Larantuka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Lap)	1	70,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Adonara Timur, Adonara Barat, Wulanggintang, Solor Barat, Larantuka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Lap)	1	74,999,986	
5	2	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Unit)	22	200,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Unit)	22	199,999,195	Penyediaan Karcis untuk pelayanan pada OPD penghasil PAD
5	2	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Lap)	1	72,000,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Lap)	1	84,999,674	
5	2	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Lap)	1	15,000,000	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Lap)	1	19,999,723	
5	2	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Larantuka (OPD)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek)	20000	23,500,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Larantuka (OPD)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek)	20000	19,999,610	
5	2	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah (Dok)	2	30,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah (Dok)	2	54,950,965	

5	2	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2	110,000,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2	83,997,000	
5	2	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dok)	1	10,000,000	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dok)	1	29,999,485	
5	2	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (Dok)	1	80,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (Dok)	1	80,000,000	
5	2	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dok)	1	32,400,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dok)	1	64,999,680	
5	2	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah (Dok)	2	22,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah (Dok)	2	59,990,530	
5	2	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	1	15,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	1	86,747,090	
5	2	4	02.1	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Lap)	1	25,000,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Lap)	1	29,999,720	

Dari analisis table diatas dapat dilihat bahwa pagu dana dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 hal ini dipandang perlu untuk tercapainya tujuan pelayanan dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang memegang peranan penting dan fungsi strategis di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. BAPENDA memiliki tujuan utama yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai target perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah secara akuntabel.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tertera pada table

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2025
1	2	2		
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	1. Presentase PAD terhadap APBD	4.07%	6.81%

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025 KABUPATEN FLORES TIMUR				
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target Capaian
1	2	3	4	5
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan PAD (%)	6.81%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur memprioritaskan pada Reformasi Birokrasi dalam sasarannya untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah terhadap belanja daerah yakni 6.81% dari total belanja daerah.

Perencanaan dan penganggaran terintegrasi pada program kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana fungsinya sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian perancangan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah.
- 2) Penyusun kebijakan teknis pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan tugas dukung teknis bidang pendapatan daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang pendapatan daerah.
- 5) Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-OPD/DPPA-OPD).
- 6) Pelaksanaan sistem pelaporan pendapatan daerah, pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perencanaan dan penganggaran yang terintergasi pada program kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju untuk tahun 2026 dapat dilihat pada table 3.3 dibawah ini.

TABEL III.3														
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN FLORES TIMUR														
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR														
KODE						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								5,994,170,000.00					6,283,626,000.00	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran %		100%	4,769,020,000			100%	5,007,471,000
							Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur (%)		100%				100%	
							Presentase ASN yang Memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100%				100%	
							Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100%				100%	
5	02	01		2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53,000,000				55,650,000
5	02	01		'2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	Larantuka (OPD)	3	20,000,000	DAU		3	21,000,000
5	02	01		'2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (dok)	Larantuka (OPD)	2	10,000,000	DAU		2	10,500,000
5	02	01		'2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Larantuka (OPD)	4	13,000,000	DAU		4	13,650,000
5	02	01		'2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Larantuka (OPD)	1	10,000,000	DAU		1	10,500,000

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,192,620,000				4,402,251,000
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Larantuka (OPD)	37 / 14	4,120,520,000	DAU		37 / 14	4,326,546,000
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas Asn (dok)	Larantuka (OPD)	12	62,100,000	DAU		12	65,205,000
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (lap)	Larantuka (OPD)	1	10,000,000	DAU		1	10,500,000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15,000,000				15,750,000
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	Larantuka (OPD)	1	5,000,000	DAU		1	5,250,000
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	Larantuka (OPD)	1	10,000,000	DAU		1	10,500,000
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan				107,000,000				112,350,000
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	1	20,000,000	DAU		1	21,000,000
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	1	20,000,000	DAU		1	21,000,000
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daera	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	1	20,000,000	DAU		1	21,000,000

5	02	01	'2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Lap)	Larantuka (OPD)	1	15,000,000	DAU		1	15,750,000
5	02	01	'2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (dok)	Larantuka (OPD)	1	18,000,000	DAU		1	18,900,000
5	02	01	'2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	Larantuka (OPD)	1	14,000,000	DAU		1	14,700,000
5	02	01	'2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10,000,000				10,500,000
02	01	'2.05	0005	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	Larantuka (OPD)	1	10,000,000	DAU		1	10,500,000
5	02	01	'2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				132,200,000				138,810,000
5	02	01	'2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Larantuka (OPD)	3	3,500,000	DAU		3	3,675,000
5	02	01	'2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Larantuka (OPD)	1	7,500,000	DAU		1	7,875,000
5	02	01	'2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Larantuka (OPD)	1	22,000,000	DAU		1	23,100,000
5	02	01	'2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Larantuka (OPD)	1	25,200,000	DAU		2	26,460,000
5	02	01	'2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dok)	Larantuka (OPD)	1	1,500,000	DAU		1	1,575,000
5	02	01	'2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	Larantuka (OPD)	1	18,000,000	DAU		1	18,900,000
5	02	01	'2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	Larantuka (OPD)	1	53,000,000	DAU		1	55,650,000
5	02	01	'2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	Larantuka (OPD)	1	1,500,000	DAU		1	1,575,000

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,000,000				9,450,000
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya (Unit)	Larantuka (OPD)	1	9,000,000	DAU	1	9,450,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			171,500,000				180,075,000
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	Larantuka (OPD)	1	1,500,000	DAU	1	1,575,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Lap)	Larantuka (OPD)	1	98,000,000	DAU	1	102,900,000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Lap)	Larantuka (OPD)	1	3,000,000	DAU	1	3,150,000
5	02	01	2.08	0004	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Lap)	Larantuka (OPD)	12	69,000,000	DAU	12	72,450,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78,700,000				82,635,000
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	Larantuka (OPD)	25	44,700,000	DAU	25	45,635,000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Larantuka (OPD)	1	22,000,000	DAU	1	22,500,000
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Larantuka (OPD)	12	12,000,000	DAU	12	14,500,000
5	02				KEUANGAN			1,225,150,000	DAU			1,276,155,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah		2	450,250,000		2	460,650,000

5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		2	450,250,000	DAU		2	460,650,000
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dok)	19 Kecamatan	2	450,250,000	DAU	2	460,650,000
5	02	04			PRORGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase target PAD		6,29%	774,900,000.00		6,29%	815,505,000.00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				774,900,000.00			815,505,000.00
5	2	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	2	10,000,000	DAU	2	10,500,000
5	0.2	04	2.01	0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Pajak Daerah serta dan Kebijakan Pajak Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	2	60,000,000	DAU	2	63,000,000
5	2	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Lap)	Adonara Timur, Adonara Barat, Wulanggitang, Solor Barat, Larantuka	1	70,000,000	DAU	1	73,500,000
5	2	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Unit)	Larantuka (OPD)	22	200,000,000	DAU	22	210,000,000
5	2	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Lap)	Larantuka (OPD)	1	72,000,000	DAU	1	75,600,000
5	2	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Lap)	Larantuka (OPD)	1	15,000,000	DAU	1	15,750,000
5	2	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek)	Larantuka (OPD)	20000	23,500,000	DAU	2000	24,675,000
5	2	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	2	30,000,000	DAU	2	31,500,000

5	2	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Larantuka (OPD)	2	110,000,000	DAU		2	115,500,000
5	2	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dok)	Larantuka (OPD)	1	10,000,000	DAU		1	10,500,000
5	2	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	1	80,000,000	DAU		1	84,000,000
5	2	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	1	32,400,000	DAU		1	34,020,000
5	2	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah (Dok)	Larantuka (OPD)	2	22,000,000	DAU		2	23,760,000
5	2	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	Larantuka (OPD)	1	15,000,000	DAU		1	16,200,000
5	2	4	02.1	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Lap)	Larantuka (OPD)	1	25,000,000	DAU		1	27,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merencanakan akan melaksanakan 3(tiga) Program utama yang didalamnya terdapat sub program penunjang yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Tealisasi Kinerja SKPD
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
 - a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah
 - d) Pengelolaan Data Retribusi Daerah
 - e) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - f) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
 - a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah
 - a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b) Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
 - f) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - k) Penagihan Pajak Daerah
 - l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah
 - o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tujuan utama Badan pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yakni mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 5.994.170.000 (*Lima miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Hal ini tersaji pada tebael 4.1

TABEL VI.1 (IKUR RKPD THN 2025)														
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH														
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025														
KODE						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KKERANGA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS DAERAH	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp.)
1						2	3	5	6	4	7	8	9	10
								5,994,170,000.00					6,242,377,658.00	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100 %	4,769,020,000		Penunjang prioritas	100 %	4,856,445,000	
							Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100 %				100 %		
							Presentase ASN yang Memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100 %				100 %		
							Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100 %				100 %		
5	02	01		2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53,000,000		PP		63,150,000	
5	02	01		2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	3	20,000,000	Larantuka (OPD)	DAU	3	20,000,000	
5	02	01		2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (dok)	2	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU	2	19,000,000	
5	02	01		2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	13,000,000	Larantuka (OPD)	DAU	4	13,650,000	
5	02	01		2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU	1	10,500,000	
26														

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,192,620,000			PP		4,210,620,000
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	37 / 14	4,120,520,000	Larantuka (OPD)	DAU		37 / 14	4,120,520,000
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas Asn (dok)	12	62,100,000	Larantuka (OPD)	DAU		12	79,600,000
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (lap)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	10,500,000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15,000,000			PP		15,750,000
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	1	5,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	5,250,000
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	10,500,000
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan			107,000,000			PP		112,350,000
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dok)	1	20,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	21,000,000
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dok)	1	20,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	21,000,000
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dok)	1	20,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	21,000,000

5	02	01	'2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Lap)	1	15,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	15,750,000
5	02	01	'2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (dok)	1	18,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	18,900,000
5	02	01	'2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	1	14,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	14,700,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000			PP		10,500,000
02	01	'2.05	0005	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	10,500,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			132,200,000			PP		173,075,000
5	02	01	'2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3,500,000	Larantuka (OPD)	DAU		3	5,000,000
5	02	01	'2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7,500,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	15,000,000
5	02	01	'2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	25,000,000
5	02	01	'2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	25,200,000	Larantuka (OPD)	DAU		2	25,000,000
5	02	01	'2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dok)	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	1,500,000
5	02	01	'2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	1	18,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	20,000,000
5	02	01	'2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	1	53,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	80,000,000
5	02	01	'2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	1,575,000

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,000,000			PP		10,000,000
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya (Unit)	1	9,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	10,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			171,500,000			PP		172,000,000
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	1,500,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Lap)	1	98,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	98,000,000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Lap)	1	3,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	3,500,000
5	02	01	2.08	0004	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Lap)	12	69,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		12	69,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78,700,000			PP		89,000,000
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	25	44,700,000	Larantuka (OPD)	DAU		25	50,000,000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	22,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	22,000,000
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		12	17,000,000
5	02				KEUANGAN			1,225,150,000		DAU			1,385,932,658
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2	450,250,000			Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	2	450,250,000

5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		2	450,250,000		DAU		2	450,250,000
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dok)	2	450,250,000	19 Kecamatan	DAU		2	450,250,000
5	02	04			PRORGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase target PAD	6,29%	774,900,000.00			Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	6,29%	935,682,658.00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			774,900,000.00					935,682,658.00
5	2	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dok)	2	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		2	15,000,000
5	0.2	04	2.01	0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Pajak Daerah serta dan Kebijakan Pajak Daerah (Dok)	2	60,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		2	30,000,000
5	2	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Lap)	1	70,000,000	Adonara Timur, Adonara Barat, Wulanggintang, Solor Barat, Larantuka	DAU		1	74,999,986
5	2	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Unit)	22	200,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		22	199,999,195
5	2	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Lap)	1	72,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	84,999,674
5	2	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Lap)	1	15,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	19,999,723
5	2	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek)	20000	23,500,000	Larantuka (OPD)	DAU		2000	19,999,610
5	2	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah (Dok)	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		2	54,950,965

5	2	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2	110,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		2	83,997,000
5	2	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dok)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	29,999,485
5	2	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (Dok)	1	80,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	80,000,000
5	2	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dok)	1	32,400,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	64,999,680
5	2	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah (Dok)	2	22,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		2	59,990,530
5	2	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Lap)	1	15,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	86,747,090
5	2	4	02.1	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Lap)	1	25,000,000	Larantuka (OPD)	DAU		1	29,999,720

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan pedoman tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, apabila dalam pelaksanaannya anggaran tidak mencukupi maka penurunan volume atau pengurangan lokasi kegiatan, pemangku kepentingan wajib mematuhi renja OPD tahun 2025.

Dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi landasan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Flores Timur selanjutnya.

Larantuka, Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Flores Timur,

Ir. TULIT BENI
Pembina Utama Muda
Nip.196408171992031018